



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Rp 1,6 Miliar
Tanggal	: Jumat, 21 November 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

## Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Rp 1,6 Miliar

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah dimulai tahun 2025. Saat ini, sudah ada 80 ribu koperasi yang sudah dibentuk.

Nantinya, kata Prabowo, seluruh Kopdes akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bisa menunjang kelancaran aktifitas koperasi seperti pendingin, gudang dan lainnya. "Dan pada akhir 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gedung yang akan menjadi 'com storage,'" kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Selasa kemarin (18/11/2025),

Direktur Utama PT Agrinias Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Souza Mota disela-sela rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, membeberkan kebutuhan anggaran pembangunan satu gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (DKKMP), mencapai Rp 1,6 miliar.

"Satu gedung DKKMP ini kita menganggarakannya Rp 1.658.000.000 atau kurang lebih sekitar Rp 2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia," kata Joao.

Ia menyampaikan, perhitungan biaya pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi

geografi berbagai daerah di Indonesia. Menurut dia, desain harga pembangunan Kopdes ini sangat rasional dan wajar.

Anggaran pembangunan yang mencapai miliaran tersebut mendapatkan pro kontra di masyarakat. Bahkan, di DPR, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Aminah Nurul Anam menilai rancangan bangunan senilai Rp 1,6 miliar untuk satu gedung Kopdes Merah Putih terlalu mewah.

"Saya melihat menganggaran tentang konsep total bangunan yang dilakukan terlalu mewah bagi saya kalau untuk tingkat desa, apalagi wujud

yang ingin kita lakukan itu adalah koperasi," kata Mufti.

IA meminta agar desain bangunan dipangkas menjadi lebih sederhana agar efisiensi anggaran tercapai. "Nah daridapa anggaran itu Rp 1,6 miliar, mendingan Bapak buat budget Rp 500 juta, target pencapaiannya bisa lebih maksimal, konsepnya lebih diminimalis, jangan terlalu sebesar ini," tegaskan.

Pandangan yang sama diungkapkan Manager Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Fitra, Badiu Hadi. Ia menganggap anggaran 1,6 miliar masih terlalu mahal.

Ia pun mendesak agar anggaran tersebut dipangkas agar lebih murah dan hemat. "Anggaran bisa ditekan lewat desain modular," ujar Badiu.

Apakah tudungan terlalu mahal dan mewah? Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron menilai anggaran yang diusulkan sudah sangat wajar. "Saya kira kalau fasilitasnya klinik, gurang, gerai sangat rasional," katanya.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Herman Khaeron dan Badiu Hadi terkait polemik anggaran pembangunan Kopdes Merah Putih sebesar Rp 1,6 miliar per unit, berikut wawancaranya.

**BADIUL HADI**, Manager Seknas Fitra

### Harusnya Anggaran Masih Bisa Dipangkas

**HERMAN KHAERON**, Anggota Komisi VI DPR

### Anggarannya Masih Wajar Dan Rasional



Kemarin, ada usulan penambangan Kopdes Merah Putih anggaran sebesar 1,6 miliar. Apa tanggapan Anda?

Anggaran Rp 1,6 miliar per unit Kopdes merupakan anggaran yang tidak masuk akal dikaitkan dengan jumlah koperasi desa/kelurahan yang sudah mencapai sekitar 8.000 unit (data September 2025).

Jika semua koperasi tersebut dibangun dengan skema fisik serupa, total anggaran bisa mencapai sekitar Rp 12,8 triliun (Rp 1,6 miliar x 8.000). Tidak realistis, bukan? Langkah pemberian risiko pemborongan anggaran publik apabila tidak didukung perencanaan matang.

Mengalokasikan dana besar tanpa analisis mendalam tentang kebutuhan lokal dan potensi bisnis koperasi

bisa berarti membangun/menyebarkan minuman koperasi. Bangunan megah tanpa fungsi produktif yang nyata, hanya menjadi beban konsumen negara.

Kenapa Anda masih pesimistik?

Saat ini, fakta bahwa banyak Kopdes belum memiliki usaha yang berjalan secara optimal menambah kekhawatiran tentang efektivitas investasi ini.

Tanpa unit bisnis yang hidup, maka hanya usaha ritel desa, simpang pingjam, UMKM, atau gudang, dengan koperasi hanya menjadi gedung kosong atau ruang administrasi yang minim manfaat.

Menurut Anda, apakah biaya pembangunan Kopdes sebesar 1,6 miliar bisa ditekan?

Anggaran ini merupakan lewat desain modular, prioritas fungsi esensial, dan procurement yang kompetitif dan transparan. ■ REN

**Kopdes perlu transparan?**

Batal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kenisitsayaa. Karena tanpa transparansi skema pengelolaan barang dan jasa untuk pembangunan Kopdes membutuhkan relasi potensi korupsi.

Terlebih jika tidak diawasi dengan transparan dan profesional, misalnya melalui audit berkala, pengawasan, monitoring dan evaluasi, dan sistem e-procurement, pembangunan Kopdes bisa menjadi ladang korupsi berskala luas.

**Apakah respons dan tanggapan Anda terkait rencana Pemerintah yang akan membangun Kopdes Merah Putih dengan biaya mencapai 1,6 miliar?**

Dengan rencana untuk membangun gudang dan fasilitas kantor Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, yang jumlahnya kurang dari 80 ribu koperasi, ini tentu saja sudah menjadi penugasan negara yang tinggal dijalankan.

Cuma yang harus dipikirkan adalah bagaimana simbelnya dana ini.

Jika sumbelnya dari APBN dan sifatnya adalah bantuan untuk pemekaran, saya kira nggak ada masalah karena itu tidak menjadi beban pengeluaran.

Tapi kalau itu dianastakan sebagai penyertaan modal yang seluruh modalnya

salah komersial atau sebuah modalnya berdasarkan pinjaman, maka harus dilitung ulang, karena jangan sampai menjadi beban hutang bagi Kopdes Merah Putih yang bersangkutan.

**Soal anggaran 1,6 miliar untuk pembangunan, bagaimana?**

Anggaran ini merupakan lewat desain modular, yang saya kira konseptualnya benar. Per meternya katanya 2,5 sampai 2,6 juta, saya kira makna sense lah ya. Tinggal nanti sistem pengawasannya seperti apa.

**Ada berita pendapat yang menilai anggaran 1,6 miliar untuk pembangunan Kopdes terlalu kembarnya?**

Ya, kalau itu silakan berbera pen-

dapat. Tapi, bisa saja anggaran pembangunan sebesar 1,6 miliar dengan fasilitas yang lebih baik, lebih bagus, kemudian sarana penunjangnya lebih mudah.

Apalagi di Kopdes tersebut juga akan dibangun klinik kesehatan, ada gudang, ada gerai. Kalau semuanya diambil imbalannya, nilai segitu saya kira cukup lah.

Dan tinggal justis bagaimana kita menghitung keekonomisannya. Itu yang penting.

Konsep penganggarannya seperti itu memang saya silahkan saja. Karena Kopdes ini adalah menjadi program nasional, program prioritas Presiden Joko Widodo dan Prabowo, yang kami mendorong dan membantu untuk mensukseskan. ■ REN